

# Politik Anggaran Pemerintah Orde Baru

Oleh Soeharsono Sagir

*Ada tiga prinsip anggaran yang dianut pemerintah sejak 1967, yaitu prinsip anggaran seimbang, fungsional, dan dinamis. Dalam kenyataannya, selama tiga Pelita ini, menurut Soeharsono Sagir, hanya dapat dilaksanakan sebagian, yaitu prinsip anggaran seimbang dan fungsional. Sedangkan prinsip anggaran dinamis, dilihat dari ketergantungan terhadap dana luar negeri sebagaimana digariskan GBHN, tidak tercapai. Kecenderungan peningkatan ketergantungan pada dana luar negeri, terutama sejak Pelita III, tidak sesuai dengan GBHN. Mengingat beban pembayaran kembali hutang luar negeri di masa datang, maka diperlukan konsistensi dalam pengelolaan dan kebijaksanaan anggaran.*



**P**olitik Anggaran Pemerintah Orde Baru yang dimulai pada tahun anggaran 1967—juga dikenal dengan istilah Kebijakan Anggaran Seimbang (*Balanced Budget Policy*)—merupakan kebijaksanaan anggaran yang dianut pemerintah sampai sekarang. Kalau dalam tiga tahun pertama menjelang Pelita I (1969/1970) anggaran seimbang ditujukan untuk mencapai stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi—setelah tahun 1966 ekonomi Indonesia mengalami hyper inflasi pada tingkat 650 persen—maka kebijaksanaan anggaran seimbang pasca stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi ditujukan untuk membangun tanpa inflasi (*Development without inflation* atau *Development within stabilization*). Pembangunan tanpa inflasi atau pembangunan tanpa gangguan inflasi yang berarti—menurut pengertian di atas hanya dapat tercapai melalui suatu kebijaksanaan anggaran seimbang—merencanakan anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan rencana anggaran pengeluaran. Kunci dari anggaran seimbang adalah menghindari terjadinya defisit dalam anggaran belanja, karena defisit dalam anggaran yang dibiayai melalui suatu *deficit financing* atau “cetak uang”, akan merupakan sumber utama inflasi.

*Balanced Budget* yang berarti seimbang—nya rencana pengeluaran dan rencana pene-

rimaan dalam RAPBN atau APBN setelah disahkan oleh DPR sebagai undang-undang untuk tahun anggaran yang akan berlaku pada tahun anggaran baru terhitung 1 April tahun yang berjalan, tidak lagi mengenal defisit, dengan adanya unsur “penerimaan pembangunan” dalam rencana penerimaan dalam APBN, nilai lawan penerimaan Devisa pinjaman luar negeri. Pos penerimaan pembangunan dalam APBN inilah yang merupakan sumber pembiayaan untuk menutup defisit dalam anggaran belanja pembangunan yang selama ini berjalan, khususnya sejak tahun pertama Pelita I sampai dengan akhir Pelita III (1969/1970 s/d 1983/1984), kemudian dilanjutkan dalam APBN tahun pertama Pelita IV (1984/1985).

Artikel ini bermaksud melakukan pengkajian terhadap Kebijakan Anggaran seimbang yang dilakukan pemerintah orde baru, khususnya dalam masa pelaksanaan Pelita I s/d Pelita III.

## Anggaran Seimbang

Ada tiga prinsip anggaran yang dianut pemerintah sejak tahun 1967, yaitu: Prinsip anggaran seimbang, fungsional dan dinamis; istilah tersebut pertama kali penulis peroleh

TABEL 1. Anggaran Seimbang dalam RAPBN (dalam milyar rupiah).

Pos Penerimaan		Pos Pengeluaran	
Penerimaan Dalam Negeri	120	Pengeluaran Rutin	100
Penerimaan Pembangunan	60	Pengeluaran Pembangunan	80
Total	180		180

dari ceramah Menkeu Ali Wardhana.<sup>1</sup> Apa yang dimaksud oleh Ali Wardhana tersebut tidak lain adalah:

*Pertama*, melakukan rencana anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan rencana pengeluaran, sehingga terdapat jumlah yang sama antara rencana pengeluaran dengan rencana penerimaan dalam APBN. Defisit dalam rencana belanja pembangunan, sebagai akibat terlalu rendahnya tingkat rencana tabungan pemerintah, dibiayai melalui sumber penerimaan pinjaman luar negeri, tidak dibiayai melalui suatu *deficit budget* atau pengambilan uang muka dari Bank Indonesia.

Secara sederhana anggaran seimbang, dapat digambarkan pada tabel 1.

Dari contoh *Tabel 1* terlihat dengan jelas bahwa rencana pengeluaran untuk Rutin dan Pembangunan yang mencapai jumlah Rp. 180 milyar, hanya mungkin dapat dicapai jikalau di pihak lain rencana penerimaan disesuaikan dalam jumlah yang sama, agar seimbang. Keseimbangan tersebut hanya dapat dicapai melalui nilai lawan pinjaman luar negeri yang direncanakan sebesar Rp. 60 milyar, untuk menutup defisit anggaran belanja pembangunan.

Dalam *Tabel 1*, terlihat dengan jelas bahwa tabungan pemerintah atau surplus yang direncanakan dari anggaran rutin (penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin) hanya mencapai Rp. 20 milyar, sedangkan rencana anggaran belanja pembangunan mencapai Rp. 80 milyar; defisit sebesar Rp. 60 milyar ditutup dengan adanya penerimaan pembangunan sebesar Rp. 60 milyar dari pos pinjaman luar negeri. Jadi jelaslah kiranya bahwa anggaran seimbang yang dimaksud dalam *Tabel 1*, merupakan suatu *artificial balanced budget*, suatu *balanced budget*

yang direncanakan secara artifisial dan dapat tercapai selama "pos penerimaan pembangunan" dapat merupakan jumlah yang dapat dicapai dalam jumlah yang sama dengan "defisit dalam anggaran belanja pembangunan" atau dengan kata lain, anggaran seimbang tidak lain suatu rencana untuk mencari dana pinjaman luar negeri yang sama besar dengan defisit dalam rencana belanja pembangunan, sebagai akibat rendahnya surplus anggaran rutin (tabungan pemerintah).

*Kedua*, prinsip fungsional dalam anggaran dimaksudkan bahwa fungsi dari penerimaan pembangunan (pinjaman luar negeri) hanya untuk membiayai anggaran belanja pembangunan. Dalam *Tabel 1*, terlihat dengan jelas bahwa dana penerimaan pembangunan sebesar Rp. 60 milyar direncanakan hanya untuk memenuhi kebutuhan rencana pengeluaran pembangunan yang berjumlah Rp. 80 milyar. Dengan kata lain, prinsip fungsional juga diartikan sebagai cara untuk menghindarkan terjadinya penggunaan dana pinjaman luar negeri untuk membiayai belanja rutin; anggaran belanja rutin harus dapat ditutup dengan penerimaan dalam negeri yang berasal dari perpajakan maupun penerimaan non-pajak, disertai surplus sebagai sumber untuk belanja pembangunan.

*Ketiga*, prinsip anggaran dinamis yang dianut dalam penyusunan RAPBN, tidak lain adalah peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun, sehingga kemampuan untuk menggali sumber dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan dapat tercapai. Prinsip anggaran dinamis dalam hal ini dapat juga diartikan secara absolut, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah tabungan pemerintah (surplus dalam belanja rutin), sehingga kemampuan untuk menyediakan dana untuk belanja pembangunan terus dapat ditingkatkan; dapat pula diartikan dalam pengertian relatif, yang diartikan semakin kecilnya persentasi ketergantungan

<sup>1</sup> Ali Wardhana, Kebijakan Anggaran Seimbang, USU ATHAN SESKOAD, Agustus, 1970.

pembiayaan terhadap bantuan atau pinjaman luar negeri.

Kalau dalam *Tabel 1*, terlihat dengan jelas ketergantungan pembiayaan pembangunan terhadap pinjaman luar negeri menunjukkan 75 persen; dari rencana pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 80 milyar, dana bantuan luar negeri dibutuhkan sebesar Rp. 60 milyar, karena dana dari sumber dalam negeri hanya mencapai Rp. 20 milyar, maka di tahun mendatang diharapkan bahwa persentasi sumber dana bantuan luar negeri (penerimaan pembangunan) akan lebih kecil atau lebih rendah dari 75 persen, walaupun secara absolut jumlah penerimaan pembangunan meningkat.

Bahwa prinsip dinamis dalam anggaran harus dipegang teguh, menurut pendapat penulis tidak lain didasarkan pada pedoman yang telah digariskan dalam GBHN, di antaranya:

"Pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor barang dan jasa. Pengerahan dana-dana investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap tersebut semakin berkurang dan akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembiayaan pembangunan."<sup>2</sup>

Dalam konteks penyusunan APBN jelaslah, bahwa bantuan luar negeri yang semakin berkurang dapat diartikan berkurang secara absolut dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dapat diartikan berkurang dalam arti relatif, berkurangnya persentasi ketergantungan pada bantuan luar negeri dalam membiayai pembangunan. Karena pembangunan adalah identik dengan kebutuhan yang semakin besar akan dana investasi atau semakin besarnya dana devisa yang dibutuhkan, maka selama persentasi ketergantungan pada bantuan luar negeri dapat semakin menurun dari tahun ke tahun, peningkatan secara absolut

bantuan luar negeri dalam APBN masih dapat ditolerir.<sup>3</sup>

Bagaimana realisasi ketiga prinsip tersebut dalam pelaksanaan APBN selama Pelita I sampai dengan Pelita III dan rencana pembiayaan pembangunan dalam Pelita IV, akan penulis bahas lebih lanjut di bawah ini.

## Realisasi APBN Pelita I sampai dengan Pelita III

Dilihat dari segi penyusunan RAPBN ataupun kemudian menjadi APBN setelah disahkan sebagai undang-undang dan berlaku sejak tanggal 1 April tahun fiskal yang berjalan, maka dapat penulis kemukakan bahwa prinsip anggaran seimbang (*balanced budget*) dan anggaran fungsional selama Pelita I s.d. III telah terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Setiap hari Senin minggu pertama, awal tahun selambat-lambatnya permulaan bulan Januari, pemerintah dengan kata Pengantar Nota Keuangan Negara/RAPBN yang diucapkan oleh Presiden Suharto selalu konsisten menunjukkan angka-angka anggaran berimbang dan anggaran fungsional. Tetapi dilihat dari segi prinsip anggaran dinamis, baik dari segi pengertian absolut maupun relatif, ternyata tidak konsisten berpedoman pada apa yang telah digariskan dalam TAP MPR/GBHN. Seperti diketahui, tuntutan pembiayaan pembangunan dalam APBN telah berakibat terjadinya peningkatan bantuan luar negeri secara absolut dari tahun ke tahun. Kalau pada tahun pertama Pelita I realisasi dana bantuan luar negeri (penerimaan pembangunan) dalam nilai tukar Rupiah baru mencapai Rp. 91 milyar, maka pada akhir Pelita III (1983/1984) telah mencapai Rp. 3.882,4 milyar; suatu kenaikan kebutuhan dana bantuan luar negeri sebesar 43 kali dalam kurun waktu 15 tahun. Demikian pula tabungan pemerintah, sebagai sumber pembiayaan pembangunan dari dalam negeri, secara absolut telah meningkat cukup besar. Kalau dalam tahun pertama Pelita I realisasi tabungan pemerintah baru mencapai nilai Rp. 27,2 milyar, maka dalam tahun terakhir

2 GBHN/TAP MPR, *Bab III Arah Pembangunan Jangka Panjang, butir 11*, terakhir diulang kembali dalam TAP MPR II/1983.

3 Soeharsono Sagir, "Perkembangan APBN yang berimbang Dinamis tidak selalu konsisten", *Sinar Harapan*, 11 Februari 1983, catatan untuk Krisna Wijaya; dan "Panduan Buku untuk mengkaji APBN", *Sinar Harapan* 10 Maret 1983.

TABEL 2. Perkembangan Realisasi Anggaran Dinamis Pelita I S/D III (dalam milyar Rupiah)

PELITA I	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74
1. Belanja Pembangunan	118,2	169,6	195,9	296,2	450,9
2. Tabungan Pemerintah	27,2	56,4	78,9	152,5	254,4
3. Bantuan Luar Negeri	91,0	120,4	135,5	157,8	203,9
4. Persentasi ketergantungan pada dana bantuan L.N.	77	66,7	59,7	48,9	43,6
PELITA II	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79
1. Belanja Pembangunan	961,8	1.397,7	2.054,5	2.156,8	2.556,6
2. Tabungan Pemerintah	737,6	903,3	1.276,2	1.386,5	1.522,4
3. Bantuan Luar Negeri	232,0	491,6	783,8	773,4	1.033,5
4. Persentasi ketergantungan pada dana bantuan L.N.	23,3	35,0	37,9	35,7	40,4
PELITA III	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
1. Belanja Pembangunan	4.014,2	5.916,1	6.940,1	7.359,6	9.899,2
2. Tabungan Pemerintah	2.635,0	4.427,0	5.235,0	5.422,0	6.020,9
3. Bantuan Luar Negeri	1.381,1	1.493,8	1.709,0	1.940,0	3.882,4
4. Persentasi ketergantungan pada dana bantuan L.N.	34,4	25,2	24,6	26,4	39,2

SUMBER: Socharsono Sagir, *Sinar Harapan* 11 Februari 1983; Nota Keuangan Negara/RAPBN 1984/85. *Business News*, 7 Mei 1984.

Pelita III angka tabungan pemerintah realisasinya mencapai Rp. 6.020,9 milyar; suatu kenaikan kemampuan dana yang digali dari sumber dalam negeri sebesar 221 kali dalam kurun waktu 15 tahun.

Kalau perbandingan antara peningkatan kemampuan menggali dana dari dalam negeri (tabungan pemerintah) dengan peningkatan jumlah bantuan luar negeri (penerimaan pembangunan) selama Pelita I s.d. III dijadikan tolok ukur, maka kenaikan kemampuan 221 kali berbanding kenaikan 43 kali, jelas menunjukkan bahwa kemampuan sumber dana dari dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan kemampuan yang bersumber dari luar negeri.

Dalam Tabel 2 diperlihatkan perkembangan realisasi APBN selama Pelita I sampai dengan III, untuk memperlihatkan sampai seberapa jauh kebijaksanaan anggaran dinamis telah dilakukan secara konsisten selama ini, dalam pengertian relatif persentasi ketergantungan pada luar negeri yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

Dari angka-angka realisasi anggaran Pelita I s.d. III pada Tabel 2, dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Selama Pelita I s.d. III telah terjadi peningkatan belanja pembangunan yang cu-

kup besar, dari Rp. 118,2 milyar pada permulaan Pelita I (69/70) meningkat sampai dengan Rp. 9.899,2 milyar pada akhir Pelita III (83/84), suatu kenaikan hampir 84 kali dalam kurun waktu 15 tahun.

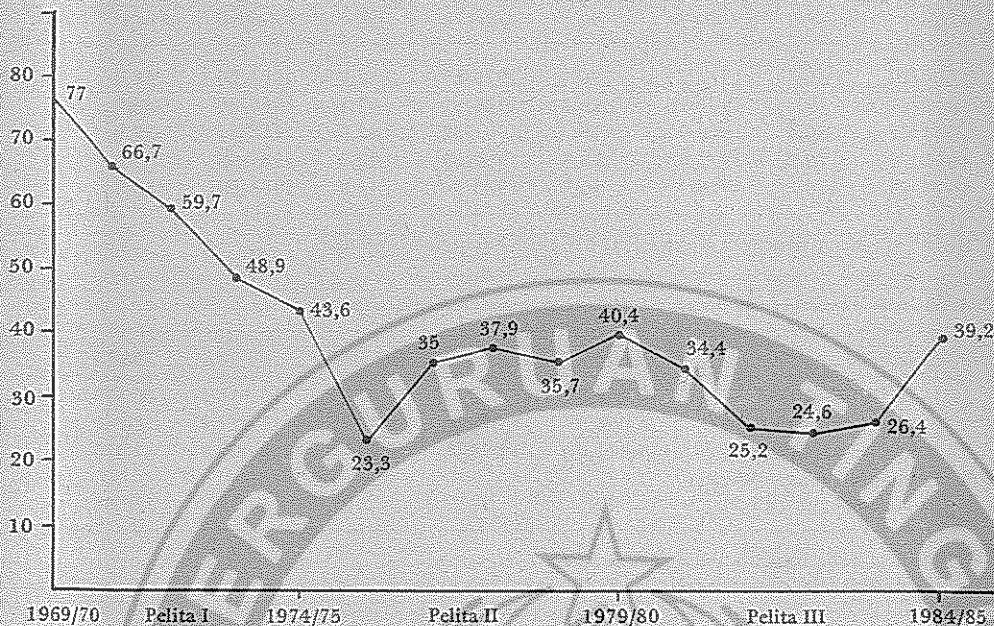
2. Terdapat korelasi positif antara krisis energi atau kenaikan harga minyak mentah dengan pelonjakan tabungan pemerintah; hal tersebut jelas terlihat dalam nilai tabungan pemerintah pada tahun 74/75 dan tahun 79/80, 80/81.

3. Bantuan luar negeri secara absolut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan; pelonjakan terjadi pada tahun 75/76, sebagai akibat krisis keuangan Pertamina dan pada realisasi tahun anggaran 1983/84 (akhir Pelita III) sebagai akibat terjadinya devaluasi Rupiah, sehingga nilai lawan Rupiah terhadap bantuan Luar Negeri sebesar US\$ 3,9 milyar meningkat.<sup>4</sup>

4. Prinsip anggaran dinamis dalam pengertian relatif, ketergantungan pada dana bantuan luar negeri yang semakin menurun, hanya terjadi pada masa Pelita I. Dalam tahun pertama Pelita II (74/75) persentasi

<sup>4</sup> Socharsono Sagir, "Realisasi APBN 1983/84 tak terlepas dari revisi akibat devaluasi", *Sinar Harapan* 21 Mei 1984.

GRAFIK Perkembangan ketergantungan pada dana bantuan luar negeri (dalam persen)



SUMBER: Lihat tabel 2.

ketergantungan pada tingkat 23,3 persen merupakan hikmah dari minyak; demikian pula tingkat ketergantungan pada tahun 80/81, 81/82. Peningkatan ketergantungan pada dana luar negeri untuk pembiayaan pembangunan tahun terakhir Pelita III (39,2 persen), tidak dapat terlepas dari penurunan penerimaan minyak, sebagai akibat turunnya harga minyak mentah OPEC. Tanpa didahului oleh devaluasi Rupiah (30 Maret 1983), realisasi APBN 1983/84 tidak akan mencapai angka Rp. 6.020,9 untuk tabungan pemerintah.

5. Perkembangan persentasi ketergantungan pada dana bantuan luar negeri menunjukkan tidak adanya kontinuitas dan konsistensi; sehingga prinsip anggaran dinamis tidak tercapai.

## Rencana Pembiayaan dalam Pelita IV

Dari Rencana Pembiayaan dalam Pelita IV, nampak jelas bahwa prinsip anggaran dinamis, dalam pengertian semakin berkurangnya persentasi ketergantungan pada dana

bantuan luar negeri, sama sekali telah ditinggalkan. Hal ini jelas—menurut pendapat penulis—tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam GBHN, khususnya Tap MPR II/1983.

Dari persentasi ketergantungan pada dana bantuan luar negeri dari Pelita I sampai dengan Pelita IV, dapat dilihat dalam Tabel 3.

Dari angka-angka Tabel 3 yang diolah dari Buku Repelita, semakin jelas kiranya bahwa dalam kebijaksanaan anggaran sulit untuk dinyatakan bahwa kebijaksanaan anggaran benar-benar secara konsisten bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dana bantuan luar negeri, seperti apa yang telah digariskan dalam GBHN.

Tabel 4 memperlihatkan proyeksi atau perkiraan Anggaran Pembangunan, Tabungan Pemerintah dan sumber dana dari luar negeri dalam Pelita IV.

Dengan menjumlahkan perkiraan dana pembangunan dalam Pelita IV kemudian kemampuan dana yang dapat digali dari dalam negeri (tabungan pemerintah), maka proyeksi ketergantungan pada dana luar negeri untuk Pelita IV, masih mencapai angka 38 persen.

TABEL 3. *Perkiraan Persentasi Ketergantungan Dana Bantuan Luar Negeri.*

<i>Pelita I</i>	<i>pCt</i>	<i>Pelita II</i>	<i>pCt</i>	<i>Pelita III</i>	<i>pCt</i>	<i>Pelita IV</i>	<i>pCt</i>
1969/70	80	1974/75	26	1979/80	42,8	1984/85	42,0
1970/71	78	1975/76	19,7	1980/81	42,3	1985/86	39,0
1971/72	80,7	1976/77	19,7	1981/82	42,3	1986/87	37,0
1972/73	79,2	1977/78	18,3	1982/83	42,3	1987/88	37,0
1973/74	76	1978/79	15,9	1983/84	41,9	1988/89	36,0

SUMBER: Nota Keuangan Negara/RAPBN 1984/85; diolah kembali.

TABEL 4. *Perkiraan Pembiayaan Pembangunan dalam REPELITA IV.*

<i>Pos anggaran</i>	<i>1984/85</i>	<i>1985/86</i>	<i>1986/87</i>	<i>1987/88</i>	<i>1988/89</i>
1. Dana Pembangunan	10.459,3	13.170,5	15.472,2	18.114,6	20.523,5
2. Tabungan Pemerintah	6.048,3	8.072,5	9.756,9	11.427,3	13.048,0
3. Bantuan Luar Negeri	4.411,0	5.098,0	5.715,3	6.686,8	7.475,5
4. Persentasi ketergantungan pada dana bantuan L.N.	42	39	37	37	36

SUMBER: Buku *Repelita IV*; diolah kembali.

Dari kebutuhan dana pembangunan sebesar Rp. 48.353,5 milyar, perkiraan tabungan pemerintah hanya akan mencapai Rp. 29.386,6 milyar.

## Kebijaksanaan Anggaran yang Telah Berjalan

Kebijaksanaan Anggaran yang sudah berjalan selama ini, khususnya anggaran seimbang (*balanced budget*) dapat dinyatakan telah berhasil dalam melakukan pengendalian inflasi selama kurun waktu 15 tahun terakhir, terutama dalam realisasi anggaran Pelita I s.d. III. Terjadinya gejala inflasi dalam tahun-tahun pelaksanaan Pelita I sampai dengan III, hanya terjadi sebagai akibat kebijaksanaan pemerintah, baik melalui kenaikan harga BBM di dalam negeri, maupun sebagai akibat devaluasi Rupiah pada bulan Nopember 1978 (KNOP 15) maupun bulan Maret 1983. Dalam 15 tahun terakhir, tingkat inflasi tertinggi dalam tahun anggaran hanya terjadi pada tahun 1973/74. Itu pun bukan semata-mata akibat dari kebijaksanaan anggaran, tetapi akibat rezeki nomplok (*windfall gain*) minyak, dan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh P.N. Pertamina. Bahwa ada korelasi positif antara tingkat inflasi dengan kenaikan harga minyak, kebijaksanaan penyesuaian harga BBM dan

devaluasi Rupiah, dapat dilihat dalam perkembangan tingkat inflasi dalam Pelita I sampai dengan Pelita III, yang terlihat dalam *Tabel 5*.

Dari *Tabel 5* terlihat dengan jelas bahwa pengaruh kenaikan harga minyak mentah, yang merupakan sumber penerimaan negara, peningkatan belanja negara dalam tahun-tahun 1972/73-1973/74 dan tahun 1979/80-1980/81, telah sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Inflasi dalam tahun-tahun terakhir (1981/82-1983/84) lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM, bahkan untuk tahun 1983/84 ditambah lagi oleh devaluasi Rupiah Maret 1983. Tanpa adanya kenaikan harga BBM di dalam negeri, maka tingkat inflasi untuk tahun 1981/82 maupun 1982/83, hanya akan mencapai 5,1 persen dan 3,81 persen.

## Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian anggaran ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan anggaran seimbang yang telah dilakukan selama Pelita I s.d. III telah menunjukkan keberhasilan untuk menekan laju inflasi.
2. Gejala inflasi yang terjadi merupakan eksis dari krisis energi minyak dan kenaikan harga BBM di dalam negeri; dari segi anggaran

TABEL 5. Perkembangan laju inflasi dalam Pelita I s/d III. (dalam persentasi)

<i>Pelita I</i>	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74
inflasi	9,8	7,8	0,8	20,8	47,4
<i>Pelita II</i>	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79
inflasi	20,1	19,8	21,1	10,7	9,91
<i>Pelita III</i>	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
inflasi	20,65	15,85	9,80	8,40	12,63
Pengaruh kenaikan BBM	4,66	3,79	4,7	4,59	3,42
Pengaruh devaluasi	—	—	—	—	2,43

SUMBER: diambil dari beberapa sumber, diantaranya diolah dari Laporan Bank Indonesia.

an *balanced budget* telah berhasil melakukan pengendalian inflasi.

3. Prinsip anggaran seimbang, fungsional dan dinamis dalam kenyataannya hanya dapat dilaksanakan sebagian saja, ialah prinsip seimbang dan fungsional. Prinsip anggaran dinamis dalam pengertian relatif maupun absolut dilihat dari ketergantungan terhadap dana bantuan luar negeri seperti apa yang digariskan dalam GBHN dalam rangkaian Pelita I s.d. III ternyata tidak tercapai.

4. Kecenderungan peningkatan ketergantungan pada dana bantuan luar negeri, terutama sejak Pelita III dan akan disusul dalam Pelita IV (proyeksi) merupakan kebijaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam GBHN.

5. Apa yang dikenal dengan kebijaksanaan anggaran seimbang, sebenarnya merupakan suatu keseimbangan semu (artifisial), anggaran tidak seimbang kalau dilihat dari segi adanya defisit dalam belanja pembangunan yang baik absolut maupun relatif semakin tergantung pada "penerimaan pembangunan" yang tidak lagi merupakan *soft loan*, tetapi juga sebagian merupakan kredit komersial.

6. Mengingat beban pembayaran kembali hutang-hutang luar negeri dimasa depan, maka perlu adanya konsistensi dalam pengelolaan ataupun kebijaksanaan anggaran dalam tahun-tahun yang akan datang; upaya untuk menekan ketergantungan pada dana bantuan luar negeri.

